

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2024
- Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford University Press, 1999.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2001.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Syahrur, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisir, Riau, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987.
- Sarbini dan Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Keragaman Konsep Hukum, Tipe kajian, dan Penelitiannya, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2012.
- Tim Penyusun, *Analisis Profil Penduduk Indonesia Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2022.

Wiradi, Gunawan, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press, Bandung, 2009.

Jurnal / Disertasi / Tesis / Skripsi / Kamus / Laporan

Abdul Jamil Sarifuddin, Iwan Erar Joesoef, *Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, National Conference on Law Studies (NCOLS), Vol. 5, No. 1, 2023.

Agung Wardana, *Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2022.

Ahmad Nizami F. et al., *The Urgency of Food Estate for National Food Security in the Middle of the COVID-19 Pandemic*, Journal of Government and Political Issues, Vol. 1, No. 1, 2021.

Anggitha Serevina Sigalingging, *Adaptasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Risiko Banjir Rob di Wilayah Pesisir Belawan (Studi Kasus: Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2025.

Athanaya Kareena, Elia Ayunita, Kharisma Nurul, *Enviromental and Social Impact Analysis Using Remote Sensing: Case Study of Food Estate Merauke, Papua*, Majalah Pembelajaran Geografi, Vol. 08, No. 01, 2025.

Cory Marlia et al., *Kepemimpinan Pemerintahan di Era Bonus Demografi*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 1, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Devi Andriyani et al., *Implementasi Food Estate terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia*, Ekombis Jurnal Fakultas Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2022.

Edwin Ogar et al., *Science Must Embrace Traditional and Indigenous Knowledge to Solve Our Biodiversity Crisis*, One Earth, Vol. 3, No. 2, 2020.

Eny I. et al., *Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands*, Sustainability, Vol. 14, No. 7, 2022.

Everistus Rikardus, *Ketahanan Pangan dan Hak Akses Lahan bagi Masyarakat Adat di Merauke: Kajian Kritis atas Implementasi Kebijakan Publik*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 1, 2025.

- Fathurrohman et al., *Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban*, SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski dan Stanley L, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006.
- Indroth M., *Indigenous Rights as Tactics of Neoliberal Governance*, Social & Legal Studies, Vol. 23, No. 3, 2014.
- Irène Bellier, Martin Préaud, *Emerging Issues in Indigenous Rights*, The International Journal of Human Rights, Vol. 16, No. 3, 2011.
- Irwandi dan Endah R. Chotim, *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta*, JISPO, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Lingga Abi Rahman, *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Marcelle Burns, *Indigenous Nations' Rights in the Balance*, International Journal of Critical Indigenous Studies, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Mega Puspa Kusumojati, Abraham Ferry Rosando, *Peran Badan Pertanahan Dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah melalui Mediasi*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Muur, W., *Forest Conflicts and the Informal Nature of Realizing Indigenous Land Rights in Indonesia*, Citizenship Studies, Vol. 22, No. 2, 2018.
- Nur Alya Syahra et al., *Teori Ekonomi Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan Jean Baptiste Say serta Relevansinya di Indonesia*, Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Robert Alexy, *On The Concept and The Nature of Law*, Ratio Juris, Vol. 21, No. 3, 2008.
- Roni Septian, *Masalah Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

- Saim Aksinudin, *Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Samel Watina, Inez Cara dkk, *Implementation of Sustainable Agriculture in South Papua Food Estate: An Analysis of Economic and Social Impacts on Communities*, FMDB Transactions on Sustainable Environmental Science, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Sri Nurhayati Qodriyatun dan Rahmat Sawalman, *Food Estate di Era Prabowo: Solusi Swasembada atau Ulangi Kesalahan Lama?*, Isu Sepekan Komisi IV DPR RI, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, November 2024.
- Suci Rahmadani, M. Imanuddin Kandias Saraan, *Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Willem van der Muur, *Forest Conflicts and the Informal Nature of Realizing Indigenous Land Rights in Indonesia*, Citizenship Studies, Vol. 22, No. 2, 2018.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, *The National Strategic Project (PSN) of Food & Energy Development in Merauke Regency, South Papua Province: Violating Human Rights & Worsening Environmental Crisis*, PUSAKA, 2024.
- Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Al-Fikr, Vol. 22, No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku Terpencil, 1989 (ILO Convention No. 169).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 61/295, 13 September 2007.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Website

- Asia Society Policy Institute. *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Diakses dari <https://asiasociety.org/id/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/glossary/sosial/free-prior-and-informed-consent-fpic-persetujuan-atas-dasar-informasi-awal-tanpa-paksaan-fpic>, diakses 11 Oktober 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Kabupaten Merauke.” Diakses 24 September 2025. <https://papua.bpk.go.id/kabupaten-merauke>.
- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Papua Selatan. “Kabupaten Merauke”. Diakses 20 September 2025, dari <https://biropap.papuaselatan.go.id/kabupaten/1/kabupaten-merauke.html>.
- CNN Indonesia. “KPA: 660 Konflik Agraria Pecah Sepanjang 2020-2023, Imbas PSN Ada 105”. Diakses 8 Agustus 2025, pukul 07.34, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017203725-12-1012525/kpa-660-konflik-agraria-pecah-sepanjang-2020-2023-imbaspn-ada-105/>.
- DetikFinance. “Hashim Ungkap Alasan Prabowo Kukuh Jalankan *Food Estate* Meski Banyak Kritik”. 11 Desember 2024. Diakses 23 September 2025, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7681166/hashim-ungkap-alasan-prabowo-kukuh-jalankan-food-estate-meski-banyak-kritik>.
- Mongabay. Hans Nicholas Jong. “UN Calls Out Indonesia’s Merauke *Food Estate* for Displacing Indigenous Communities”. 24 Juni 2025. Diakses 24 September 2025, dari <https://news.mongabay.com/2025/06/un-calls-out-indonesias-merauke-food-estate-for-displacing-indigenous-communities/>.
- Wulandari, Retno. “Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Tantangan dalam Implementasinya.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 19 Februari 2024. Diakses pada 15 November 2025, dari <https://setkab.go.id/pengakuan-hak-hak-adat-dalam-kebijakan-otonomi-khusus-papua-tantangan-dalam-implementasinya/>.
- Tempo. “*Airlangga Bandingkan Lahan Food Estate Merauke dan Australia*”. diakses 30 Januari 2026, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/airlangga-bandingkan-lahan-food-estate-merauke-dan-australia-2106923>
- Total Politik. “*Food Estate* di Papua: Tantangan dan Harapan Baru”. 11 November 2024. Diakses 23 September 2025, dari <https://totalpolitik.com/2024/11/11/food-estate-di-papua-tantangan-dan-harapan-baru/>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ind (YLBHI). “Mendesak Komnas HAM Menerbitkan Rekomendasi untuk Presiden Menghentikan PSN Merauke”. 14 April 2025. Diakses 15 September 2025, dari

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mendesak-komnas-ham-menerbitkan-rekomendasi-untuk-presiden-menghentikan-psn-merauke/>.

